

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moratorium<sup>1</sup> Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal<sup>2</sup> ke Timur Tengah yang diatur dalam keputusan Kementerian Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015.<sup>3</sup> Pemberlakuan kebijakan ini hanya diterapkan pada TKI sektor Informal saja, dikarenakan sektor ini masih rawan akan praktik kekerasan dan permasalahan lainnya. Kebijakan moratorium ke Timur Tengah ini merupakan kebijakan yang kedua kalinya dan bersifat meluas. Disebut sebagai kebijakan yang kedua, dikarenakan sebelumnya pemerintah Indonesia juga pernah melakukan moratorium TKI informal, yakni pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya akan ditulis SBY). Moratorium yang kedua pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (selanjutnya akan ditulis Jokowi) ini dinyatakan sebagai moratorium meluas karena cakupan negara moratorium yang semakin bertambah.

---

<sup>1</sup> Moratorium adalah penangguhan sementara sebuah peraturan atau pemberhentian yang bersifat sementara saja.

<sup>2</sup> Terdapat dua jenis sektor pekerjaan TKI yakni, sektor informal dan formal. *TKI informal* adalah TKI yang biasa disebut *domestic worker* di mana mereka bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, bekerja pada pihak perseorangan yang tidak berbadan hukum atau disebut majikan, hubungan pekerjaan ini bersifat subjektif dan rentan terjadi masalah. Sedangkan *TKI formal*, adalah TKI yang bekerja di berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, dilengkapi dengan kontrak kerja yang kuat, serta dilindungi hukum di negara penempatan, sehingga jarang mendapatkan permasalahan selama kerja.

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015, Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Semula kebijakan moratorium hanya diberlakukan pada negara Saudi Arabia, Kuwait, Yordania dan Suriah pada masa SBY,<sup>4</sup> kemudian bertambah menjadi 19 negara Timur Tengah pada masa Presiden Joko Widodo, 19 negara Timur Tengah tersebut adalah: Saudi Arabia, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman dan Yordania.<sup>5</sup> Hal ini menjelaskan bahwa pada kenyataannya kebijakan moratorium TKI informal bukanlah sebuah kebijakan baru, namun merupakan kebijakan yang sudah mulai diberlakukan pada masa SBY pada tahun 2011 lalu.<sup>6</sup>

Kebijakan moratorium TKI yang diatur dalam keputusan Kementerian Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 ini berisi tentang<sup>7</sup>: kebijakan penghentian dan pelarangan pengiriman TKI ke negara-negara di kawasan Timur Tengah ini berlaku bagi pemberangkatan yang baru saja, dalam artian TKI yang telah mendaftar pemberangkatan ke negara-negara di kawasan Timur-Tengah sebelum berlakunya kebijakan ini masih dapat melanjutkan pemberangkatannya. Hal ini terkait dengan sifat peraturan serta UU RI yang tidak berlaku surut, di sisi lain peraturan ini juga memberikan dispensasi bagi TKI yang telah bekerja di negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan batas kontrak yang telah ditentukan pada awal pelaksanaan kerja. Namun, bagi para TKI yang masih

---

<sup>4</sup>BNP2TKI, *Moratorium Dilakukan Untuk Menekan Permasalahan TKI*, diakses pada <http://www.bnp2tki.go.id/read/9291/Kepala-BNP2TKI:-Moratorium-Dilakukan-untuk-Menekan-Permasalahan-TKI> diakses pada 13 Desember 2017, pukul 17:25 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Cakti Indra Gunawan dan Reiza, *The Strategy Of Human Economic Development: The Effect On Reducing Migrant Worker Of Informal Sector*, Jurnal Unitri, Vol 3, No 1, 2015, hal. 47-54.

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015, *Op. Cit.*

memiliki kontrak dengan tempat ia bekerja diperbolehkan pula untuk melakukan perpanjangan kontrak setelah kontrak berakhir selama memenuhi prasyarat dan tahapan yang benar. Beriringan dengan hal tersebut, pemerintah juga menghimbau TKI yang telah habis kontraknya untuk segera kembali ke tanah air.

Diberlakukannya moratorium TKI informal ke 19 negara Timur Tengah ini, pada gilirannya mampu mempengaruhi jumlah remitansi<sup>8</sup> yang masuk, dan secara tidak langsung pula dapat mempengaruhi jumlah cadangan devisa<sup>9</sup> negara. Hal ini dikarenakan remitansi berada di urutan nomor 2 sebagai penyumbang devisa negara setelah sektor minyak dan gas.<sup>10</sup> Remitansi terbesar yang diterima Indonesia berasal dari kawasan Asia dengan jumlah hingga 64% dengan perincian: remitansi dari Malaysia sebesar USD 2,6 miliar, Hongkong sebesar USD 417 juta, dan Taiwan USD 358 juta.<sup>11</sup> Kawasan Timur Tengah dan Afrika menempati posisi kedua sebagai penyumbang remitansi terbesar dengan jumlah 35%, dengan rincian sebagai berikut: remitansi dari Arab Saudi sebesar USD 1,7 miliar, diikuti Uni Emirat Arab (UEA) sebesar USD 145 juta, serta Yordania dan Suriah sebesar USD 84 juta sepanjang tahun 2008-2014.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Remitansi merupakan, sejumlah uang yang dikirim oleh para TKI ke negara asalnya, dimana uang tersebut merupakan hasil upah atau gaji yang ia peroleh dari negara tempat penempatan ia bekerja.

<sup>9</sup> Menurut KBBI cadangan devisa adalah, cadangan dalam satuan mata uang asing yang dipelihara bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional (*reserve currency*.)

<sup>10</sup> Bintara Sura Priambada, *Pengaruh Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol 8, No 1, 1 Maret 2014, ISSN: 1978-6697, hal. 1-28.

<sup>11</sup> Siska Intan Permata Sari, Lilik Sugharti, *Dampak Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia (SNSE) 2008*, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Vol. 01 No.2, Desember 2016, hal: 51-65.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut, banyaknya TKI yang tersebar di kawasan Asia dan Timur Tengah ini dilatar belakangi dengan tingginya permintaan, tingginya gaji yang ditawarkan serta adanya kenyataan minimnya lapangan pekerjaan di negara asal. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terdapat 41.311 orang yang dikirim ke Arab Saudi, 17.158 orang ke Oman, 16.400 orang ke Uni Emirat arab, 7.380 orang ke Qatar, 4.985 orang ke Bahrain dan 1.608 orang ke Kuwait sepanjang 1 Januari hingga 30 November 2015 lalu.<sup>13</sup> Oleh karena itu, dengan adanya kenyataan ini maka upaya pemerintah dalam penempatan, pengawasan serta perlindungan para TKI di kawasan Timur Tengah haruslah sangat serius, mengingat banyaknya kasus TKI bermasalah dengan hukum.

Permasalahan moratorium menjadi suatu pembahasan yang cukup sensitif jika dikaitkan dengan pendapatan negara. Logika sederhananya adalah ketika moratorium diberlakukan maka terjadi pemberhentian sementara pemberangkatan TKI ke sejumlah negara yang terkait, dengan pemberhentian ini maka diikuti pula dengan berkurangnya pengiriman remitansi yang berdampak pada cadangan devisa negara. Pemberlakuan moratorium oleh pemerintah ini, kemudian menjadi sebuah dilema dimana di satu sisi pemerintah harus konsen pada perlindungan para TKI, namun di sisi lain pula pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan perihal pemasukan serta perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas maka, penelitian ini akan menganalisa tentang latarbelakang diberlakukannya kembali kebijakan pemerintah Indonesia tentang

---

<sup>13</sup> Utami Diah Kusumawati, *Moratorium TKI ke Timur Tengah dinilai Kepanikan Pemerintah*, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150507200500-20-51956/moratorium-tki-ke-timur-tengah-dinilai-kepanikan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 14.52 WIB.

moratorium TKI informal ke kawasan Timur Tengah. Hal ini terkait dengan faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi lahirnya kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan permasalahan tersebut dengan menyertakan teori *Determinants of Foreign Policy Behavior* yang mampu mengkerangkai permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada serangkaian penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya mengenai analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang moratorium TKI informal ke Timur Tengah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, maka peneliti dapat menuliskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut yakni, Mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat tujuan utama yakni:

1. Untuk mengetahui alasan lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang moratorium TKI Informal ke Timur Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam memberlakukan kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua yakni, manfaat akademis serta manfaat praktis, berikut merupakan penjelasan dari kedua manfaat tersebut:

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan bagi ilmu hubungan internasional terutama yang berfokus pada isu-isu berhubungan dengan analisis kebijakan luar negeri suatu negara, terlebih berkenaan dengan bagaimana respon suatu negara tentang fenomena tertentu melalui kebijakan luar negeri yang dibuat.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta bahan rujukan bagi para akademisi dalam melakukan penelitian yang serupa dan dapat pula dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam menyikapi TKI bermasalah serta pemilihan kebijakan luar negeri yang tepat untuk mengatasinya. Terlebih berkenaan dengan kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah yang mana apabila kebijakan tersebut dirumuskan secara matang akan membawa dampak yang positif bagi negara dan apabila kebijakan tersebut dirumuskan dengan kurang matang maka akan menjadi bumerang bagi negara Indonesia yang mana nantinya mampu berimbas pada meningkatnya penggangguran dan timbulnya berbagai permasalahan sosial baru lainnya.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis kebijakan moratorium TKI informal ke kawasan Timur Tengah, dewasa ini menjadi sebuah isu yang cukup menyita perhatian akademisi, terutama yang bergerak pada bidang ilmu sosial dan politik. Berangkat dari kasus inilah kemudian banyak bermunculan penelitian guna mengkaji lebih dalam terkait bagaimana sesungguhnya peranan pemerintah melalui kebijakannya dalam upaya perlindungan TKI Informal yang berada di negara-negara lain. Berikut penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian yang menyoroti kebijakan pemerintah tentang TKI, serta permasalahan-permasalahan lainnya yang terkait dengan TKI:

Penelitian pertama yakni, Penelitian yang dilakukan oleh Purwaka Hari Priyanto pada tahun 2013, yang meneliti tentang *Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia*.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadi penurunan pekerja migran Indonesia rata-rata 4,15 persen pertahun pada rentang waktu 2005-2012. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah TKI yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi. Jumlah TKI di Malaysia mengalami penurunan rata-rata 10,46 persen per tahun sedangkan Arab Saudi menurun hingga rata-rata 11,46 persen per tahun. Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa, kebijakan moratorium TKI ke Malaysia dan Arab Saudi sejak tahun 2009 berdampak signifikan terhadap turunnya rata-rata total TKI yang bekerja di luar negeri yang hanya mencapai 102.049 orang TKI pertahun

---

<sup>14</sup> Purwaka Hari Priyanto, *Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 1 No. 7, April 2013, hal. 57-72.

dalam rentang waktu 2005-2012. Pada sektor pekerja informal, pemberlakuan moratorium memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan rata-rata total TKI yang hanya mencapai jumlah 151.731 pertahun dalam periode yang sama. Sedangkan pada sektor formal, walaupun koefisien regresi menunjukkan angka positif, namun secara statistik dampak kebijakan moratorium tidak berpengaruh signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian yang mana, penelitian yang dilakukan oleh Purwaka Hari Priyanto berupaya untuk menyoroti dampak moratorium terhadap peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya kebijakan moratorium tersebut. Lebih lanjut terdapat perbedaan yang mencolok pada kedua penelitian ini yakni pada segi jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni, penelitian yang dilakukan oleh Purwaka Hari Priyanto menggunakan jenis data kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan data kualitatif.

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Amanda R.Y dengan judul *Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi*.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Amanda ini menyatakan bahwa meski kebijakan moratorium di ambil sebagai upaya penanganan TKI bermasalah dan bertujuan untuk meminimalisir jumlah penganiayaan TKI, namun pemberlakuan peraturan ini masih belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil dalam menangani permasalahan tersebut. Amanda menyatakan demikian, dikarenakan pemberlakuan

---

<sup>15</sup> Amanda R. Y, *Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol 5, No 2, Juni 2016, hal 465-475.



moratorium justru mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal. Pemberlakuan moratorium TKI ke Arab Saudi di sisi lain juga berdampak pada jumlah pengiriman TKI, hal ini akan menyebabkan naiknya jumlah pengangguran yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri. Meski demikian, Amanda berargumen bahwa dengan adanya moratorium ini tidak akan mempengaruhi jumlah remitansi yang masuk. Hal ini dikarenakan meski adanya penurunan pengiriman jumlah TKI informal, namun pada kenyataannya diikuti pula dengan meningkatnya jumlah penghasilan atau gaji yang diterima oleh para TKI. Selain itu, dengan adanya moratorium ini berdampak pada berkurangnya jumlah kekerasan TKI, diiringi dengan adanya pengetatan dan perbaikan sistem mekanisme penempatan TKI secara menyeluruh, serta pembenahan dalam proses keberangkatan terkait dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesiapan mental dan fisik calon TKI.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Amanda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kasus. Dalam penelitiannya, Amanda menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Interdependensi dan *Dual Labour Market Theory* sebagai media untuk menjelaskan subjek penelitian yang dilakukan olehnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan *Determinants of Foreign Policy Behavior*. Selain itu, perbedaan kedua penelitian ini pula terlihat dari fokus kajiannya, yang mana Amanda memusatkan perhatiannya pada dampak dari kebijakan moratorium TKI pada masa SBY terhadap pengiriman TKI ke Arab Saudi. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya kembali moratorium TKI informal ke negara-negara Timur Tengah pada masa Jokowi.

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Bintara Sura Priambada yang berjudul *Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.<sup>16</sup> Bintara menyatakan dalam penelitiannya bahwa moratorium pengiriman TKI ke luar negeri memiliki pengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan remitansi dari para TKI berada pada urutan kedua dalam memberikan pemasukan negara setelah sektor migas. Dengan adanya kebijakan moratorium TKI maka akan ada penurunan devisa negara yang berdampak pada APBN secara langsung. Bintara menyajikan pula solusi yang dapat mengatasi penurunan APBN akibat dari moratorium yakni: menciptakan iklim dengan proyek-proyek padat karya serta meningkatkan industri ekspor yang dapat memacu peningkatan devisa serta dapat menyerap banyak tenaga kerja, hal ini sangat relevan jika dikaitkan dengan prospek ekspor pada sektor industri tekstil yang terus meningkat tiap tahunnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Bintara dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang dilakukan, di mana Bintara menggunakan metode deskriptif dengan menitik beratkan penelitian pada permasalahan moratorium TKI yang berdampak pada penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai fokus utama penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian eksplanatif yang berusaha untuk menjelaskan alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya kembali moratorium

---

<sup>16</sup> Bintara Sura Priambada, *Op.Cit*

TKI informal ke Timur Tengah dengan cakupan yang meluas ke 19 negara. Hal ini membuktikan terdapat perbedaan yang sangat besar antara kedua penelitian ini.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yesi Suryanti pada tahun 2017 meneliti tentang *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Sikap Masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur* ini,<sup>17</sup> menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini ditandai dengan sikap masyarakat yang cenderung menolak karena merasa dirugikan dengan diberlakukannya kebijakan tersebut. Sikap ini dilatar belakangi dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan, meski demikian di sisi lain mereka menyadari pula bahwa kebijakan ini tentu diberlakukan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada subyek penelitiannya. Jika penelitian yang dilakukan oleh Yesi Suryanti berfokus pada sebuah komunitas dalam hal ini adalah entitas penduduk dalam suatu desa yakni, masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur mengenai respon mereka terkait kebijakan pemberhentian pengiriman TKI oleh pemerintah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan

---

<sup>17</sup> Yesi Suryanti, *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Sikap Masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur* (Skripsi), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

berfokus pada alasan pemerintah dalam memberlakukan moratorium TKI ke kawasan Timur Tengah, yang mencakup 19 negara Timur Tengah.

Penelitian selanjutnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Desty Purwanti 2013, meneliti tentang *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2007*,<sup>18</sup> menunjukkan hasil bahwa permasalahan terkait PRT perlu adanya proses penanganan yang terintegrasi antara instansi-instansi pemerintah dengan pihak lainnya yang memiliki peran dalam penempatan dan perlindungan TKI, serta diperlukannya kebijakan yang komperhensif mengenai ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal ini dikarenakan masih minimnya upaya pemerintah dalam perlindungan TKI di luar negeri, dan belum terlaksananya undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang pempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, terutama pada pasal 92 ayat 2 tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi TKI di luar negeri. Selain itu, peran BNP2TKI dan lembaga PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) seringkali tidak sesuai dengan prosedur seharusnya dan bahkan tidak bertanggung jawab terhadap TKI. Di sisi lain pemerintah juga perlu menempuh jalur diplomasi guna melindungi para TKI yang bermasalah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Desty Purwanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni, penelitian yang dilakukan oleh Desty lebih berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan PRT di Arab Saudi serta realisasi undang-undang Nomor 39 tahun 2004, pasal 92 ayat 2 tentang

---

<sup>18</sup> Desty Purwanti, *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Asudi Tahun 2006-2012* (Skripsi), Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terpaku pada pemberlakuan kebijakan moratorium TIK informal ke kawasan Timur Tengah oleh pemerintah Indonesia. dengan demikian terdapat dua fokus utama yang berbeda, yakni kebijakan yang hendak dianalisis dan cakupan wilayah yang menjadi subyek penelitian, yakni antara Arab Saudi dan 19 kawasan Timur Tengah yang tercantum dalam kebijakan moratorium.

Penelitian selanjutnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Siti Umi Hani tentang *Upaya Diplomasi Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Arab Saudi*,<sup>19</sup> hasil dari penelitian ini adalah, diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi terkait permasalahan kasus kekerasan yang terus dialami oleh para TKW dianggap belum memiliki hasil yang signifikan. Salah satu bentuk diplomasi SBY adalah dengan membentuk Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada Mei 2007 melalui UU 39/2004 serta menerapkan kebijakan moratorium TKI informal ke Arab Saudi, namun kebijakan ini dianggap bukan sebagai solusi yang efektif dikarenakan adanya logika bisnis yakni, ketiadaan suplai PRT dari Indonesia akan digantikan negara lain yang mampu mengisi kekosongan tersebut, negara-negara yang dapat dipastikan akan mengisi kekosongan tersebut adalah: Filipina, Srilanka, Bangladesh, Pakistan, Afrika dan Amerika Selatan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada subjeknya yakni jika peneliti sebelumnya memfokuskan pada

---

<sup>19</sup> Siti Umi Hani, *Upaya Diplomasi Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Arab Saudi*, (Skripsi), Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

upaya diplomasi serta kebijakan-kebijakan terkait TKI pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penulis memilih subjek penelitian analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diberlakukannya kembali kebijakan moratorium TKI informal ke 19 kawasan Timur tengah pada masa Joko Widodo. Selain itu jenis penelitian serta penggunaan konsep pada kedua penelitian ini sangat berbeda yakni, penelitian yang dilakukan Siti Umi Hani menggunakan jenis penelitian deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berjenis eksplanatif. Pendekatan yang dilakukan Hani yakni diplomasi dan kekerasan terhadap wanita, sedangkan konsep yang digunakan oleh penulis adalah konsep *Determinants of Foreign Policy Behavior*.

Penelitian selanjutnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Alawi Jufri tentang *Upaya Diplomati Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Mengupayakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Tahun 2009-2014*.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini adalah, terdapat beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden SBY dalam rangka perlindungan TKI di Arab Saudi, diantaranya yakni: *pertama*, memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah Indonesia terutama instansi yang terkait dalam kepengurusan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan TKI yang ditempatkan di Arab Saudi, *kedua*, pengiriman nota protes dan nota diplomatik akan sikap Arab Saudi yang terlalu gegabah dalam memvonis TKI yang dihukum pancung tanpa koordinasi yang tepat dengan pihak Indonesia, *ketiga* yakni, diplomasi politik dengan pemberlakuan moratorium TKI untuk mencapai kesepakatan MoU dengan Arab Saudi, *keempat* yakni, diplomasi sosial

---

<sup>20</sup> Moh. Alawi Jufri, *Upaya Diplomati Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Mengupayakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Tahun 2009-2014*, (Skripsi), Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

dengan cara pendekatan dengan keluarga ahli waris agar hukuman yang diterima TKI bermasalah dapat diringankan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus yang dijadikan sebagai subjek penelitian yakni, upaya diplomasi Presiden SBY dalam melindungi TKI yang bekerja di Arab Saudi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah yang kembali di berlakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian, pendekatan atau konsep yang dipakai serta batasan waktunya. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Alawi Jufri merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan atau konsep yang dipakai adalah konsep diplomasi dan perlindungan diplomatik, serta menggunakan batasan waktu 2009-2014, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian eksplanatif, dengan pendekatan atau konsep *Determinants of Foreign Behavior*.

Penelitian selanjutnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Puspitasari dengan judul *Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI Informal (2011-2014)*.<sup>21</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rizka ini menyatakan bahwa tenaga kerja sektor informal merupakan sektor yang paling rentan mengalami pelanggaran HAM yakni, kekerasan, eksploitasi dan praktik kerja paksa di tempat ia bekerja. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang meratifikasi dua konvensi ILO mengenai kerja paksa, namun dalam kenyataannya kasus-kasus

---

<sup>21</sup> Rizka Puspitasari, *Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI Informal (2011-2014)*, Journal of International Relation, Vol. 2, No. 3, Tahun 2016, hal. 210-219.

berkeenan dengan kerja paksa ini masih sering menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Arab Saudi. Rizka berpendapat bahwa masih ditemukannya praktik kerja paksa di Arab Saudi terjadi dikarenakan 3 faktor utama yakni, ambiguitas dan ketidakpastian bahasa kerja paksa oleh Arab Saudi, keterbatasan kapasitas pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan *saudization* dan melakukan *labour inspection*, serta adanya dimensi temporal domestik lain yang lebih penting untuk diprioritaskan dibandingkan dengan isu kerja paksa ini.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizka dengan penelitaian yang dilakukan oleh peneliti teretak pada jenis penelitian yang digunakan. Penelitaian yang dilakukan Rizka merupakan penelitian deskriptif-induktif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian eksplanatif. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian, dimana pada penelitian Rizka berfokus pada analisis penyebab masih terjadinya praktik kerja paksa di Arab Saudi setelah Arab Saudi meratifikasi 2 konvensi kerja paksa ILO, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih melihat pada isu lain terkait TKI dan buruh migran yakni alasan dibalik diberlakukannya kembali moratorium TKI informal ke Timur Tengah.

Penelitian selanjutnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Linda Susistri dengan judul *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Pada TKI di Malaysia)*.<sup>22</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Undang-

---

<sup>22</sup> Linda Susistri, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Pada TKI di Malaysia)*, (Skripsi), Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.



Undang RI No 39 Tahun 2004 dilakukan melalui dua tahapan yakni eksternal dan internal. Implementasi eksternal dilakukan dengan cara upaya untuk melakukan kerjasama atau penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia berkenaan dengan penempatan dan perlindungan TKI di sektor informal, serta rekrutmen dan penempatan TKI informal di Malaysia pada tahun 2006. Selanjutnya, implementasi internal dilakukan dengan cara pembentukan BNP2TKI serta pembentukan *crisis centre* dan *citizen service* oleh BNP2TKI.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Linda Susistri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian dan pendekatan konsep yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Linda berfokus pada implementasi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dengan merujuk negara Malaysia sebagai studi kasusnya, serta menggunakan teori liberalisme dan kerjasama antar negara, hukum internasional dan HAM terhadap buruh, serta menerapkan konsep migrasi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagai alat untuk menganalisis objek penelitiannya. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peraturan pemerintah melalui keputusan Kementerian Tenaga Kerja No 260 tahun 2015 tentang pemberlakuan kembali moratorium TKI informal ke 19 negara Timur Tengah, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan *determinants of foreign policy behavior* sebagai alat analisis kasus tersebut.

Penelitian selanjutnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Prihatini Trisnawati dengan judul *Kegagalan Diplomasi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*

Tahun 2004-2009.<sup>23</sup> Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kegagalan diplomasi Presiden SBY dalam melindungi TKI di Malaysia dilatar belakangi oleh banyaknya konflik yang sering terjadi antara kedua belah pihak. Dari hubungan yang tidak harmonis inilah mengakibatkan sulitnya mencapai suatu kesepakatan dalam menciptakan iklim timbal balik antara kedua belah pihak tersebut. Adapun diplomasi Presiden SBY dalam upaya mencapai kesepakatan dengan pihak Malaysia adalah *pertama*, melakukan moratorium TKI yang dimulai pada bulan Juni 2009-Januari 2010, namun usaha ini dinyatakan kurang berhasil dikarenakan pemerintah Indonesia masih menjadikan buruh migran sebagai sebuah komoditas, *kedua* melakukan negosiasi dengan Perdana Menteri Ahmad Badawi pada Januari 2008 yang menghasilkan pembentukan EPG (*Eminent Person Group*) namun usaha ini dianggap gagal karena pemerintah Indonesia tidak mengindahkan Undang-undang No 39 tahun 2004, serta kenyataan bahwa Presiden SBY belum meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya, *ketiga* melakukan protes nota diplomatik, diplomasi ini pula dianggap gagal karena adanya MoU dengan Malaysia tentang penempatan *domestic workers* yang melegalkan pemegangan paspor PRT oleh majikan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Prihatini Trisnawati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada segi fokus pembahasan serta konsep yang dipergunakan untuk menganalisis kasus tersebut. Prihatini dalam penelitiannya berusaha melihat dan menjelaskan alasan dibalik kegagalan diplomasi yang dilakukan

---

<sup>23</sup> Prihatini Trisnawati, *Kegagalan Diplomasi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2004-2009*, (Skripsi), Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

Presiden SBY dalam usaha menyelamatkan TKI bermasalah sepanjang tahun 2004-2009, sedangkan untuk dapat mengkrangkai kasus tersebut ia menggunakan konsep diplomasi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat topik tentang pemberlakuan kembali moratorium TKI informal ke negara-negara Timur Tengah pada masa Presiden Jokowi, penulis menggunakan konsep *determinants of foreign policy behavior*.

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Koento Wijanarko yang berjudul *Kasus Nirmala Bonat dan Implikasinya Terhadap Pembentukan MoU Mengenai Penempatan TKI Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia*.<sup>24</sup> Hasil penelitian ini, Koento Wijanarko menyatakan bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa para TKI di Malaysia dewasa ini telah menjadi permasalahan yang serius, salah satunya adalah kasus Nirmala Bonat. Pada tahun 2003 Nirmala Bonat berangkat ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan status legal, dan mulai saat itu pulalah penyiksaan terhadap Nirmala Bonat berlangsung. Isu ini kemudian menjadi sebuah isu hangat yang mengakibatkan adanya reaksi dari Komite Anti Penindasan Buruh (KAPB), untuk melakukan aksi demo di depan Kantor Kedubes Malaysia di Jakarta. Aksi ini mereka lakukan untuk menuntut keadilan, agar majikan Nirmala Bonat dihukum setimpal, serta menekankan kepada pemerintah agar bersikap lebih aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang serupa. Hal ini kemudian direspon pemerintah dengan kunjungan Presiden SBY ke Kuala Lumpur guna bertemu langsung dengan Nirmala Bonat untuk mengetahui perkembangan kasus

---

<sup>24</sup> Koento Wijanarko, *Kasus Nirmala Bonat dan Implikasinya Terhadap Pembentukan MoU Mengenai Penempatan TKI Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia*, (Skripsi), Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

tersebut. Berkisah dari kasus Nirmala Bonat ini kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk MoU mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pemerintah Malaysia yang ditandatangani di Bali pada tahun 2006.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Koento Wijanarko berusaha melihat implikasi atau dampak yang terjadi setelah adanya sebuah kasus, dimana kasus yang dimaksud adalah kasus penganiayaan yang dialami oleh Nirmala Bonat sebagai TKW. Dalam penelitiannya Koento menggunakan konsep *Human Security*, Determinan Politik Luar Negeri sebagai alat analisis dari penelitian yang ia kerjakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terpacu pada pencarian alasan atau sebab yang mengakibatkan munculnya sebuah tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara yakni diberlakukannya kembali moratorium TKI informal ke Timur Tengah, sedangkan guna menganalisis kasus tersebut menggunakan konsep *Determinant of Foreign Policy Behavior*.

Penelitian selanjutnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyanto dengan judul *Peningkatan Peran Pemerintah Indonesia dalam Bidang Pengiriman Tenaga Kerja ke Korea Selatan*.<sup>25</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa sejalan dengan rendahnya penyerapan tenaga dalam negeri telah mendorong pekerja untuk mencari kesempatan bekerja di luar negeri yang memiliki upah yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan serupa di dalam negeri. Bercermin dari fenomena maraknya menjadi TKI ini, pemerintah mulai mengambil sebuah langkah baru dengan menandatangani MoU dengan Korea Selatan dalam bidang penempatan dan

---

<sup>25</sup> Agus Riyanto, *Peningkatan Peran Pemerintah Indonesia dalam Bidang Pengiriman Tenaga Kerja ke Korea Selatan*, (Skripsi), Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

perlindungan TKI di Korea Selatan, yang diwakili oleh BNP2TKI dan Pemerintah Korea Selatan pada tanggal 9 Oktober 2006 lalu. *Point* utama dari MoU ini adalah: *pertama*, upaya perbaikan dalam hal transparansi biaya penempatan TKI ke Korea melalui *EPS (Employment Permit System) G to G*, di mana kedua belah pihak sepakat bahwa setelah ditandatangani *Renew MoU* akan menyepakati biaya penempatan TKI ke Korea. *Kedua*, kewenangan Ditjen PPTKLN yang selama ini masih tertera dalam MoU 2006 telah dilimpahkan ke BNP2TKI. *Ketiga*, diharapkan dalam waktu dekat kedua Lembaga Penempatan dan Penerima TKI akan segera menyepakati dalam bentuk *Agreement* yang mengatur hal-hal teknis tentang penempatan TKI ke Korea. Perjanjian ini mengacu pada UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyanto berfokus pada upaya peningkatan peran pemerintah dalam bidang pengiriman TKI ke Korea Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis diberlakukannya kembali moratorium TKI informal ke Timur Tengah. Perbedaan selanjutnya terletak pada pendekatan dan konsep yang digunakan dalam mengkerangkai kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian, dimana pada penelitiannya Agus menggunakan konsep interdependensi, kerjasama bilateral dan konsep tenaga kerja. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan *determinants of foreign policy behavior*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rizky Nur Haryani pada tahun 2011, yang meneliti tentang *Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara dalam*

*Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga.*<sup>26</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah sebagai *Stakeholder* kebijakan tidak mampu melindungi para PRT yang bekerja di luar negeri. Hal ini menjadi kontradiksi jika merujuk pada paradigma kriminologi kritis, yang mana dalam paham ini pemerintah dipandang memiliki kekuatan untuk membuat suatu kebijakan untuk dapat berpihak pada golongan tertentu. Namun pada kenyataannya kebijakan yang dirumuskan justru terkesan berpihak pada golongan yang tidak semestinya. PRT yang seharusnya mendapatkan perlindungan ini justru menjadi instrumen negara guna meningkatkan perekonomian. Dengan sikap pemerintah yang sedemikian rupa ini dapat diterjemahkan sebagai bentuk pembiaraan, dengan kata lain pemerintah telah turut serta melakukan kekerasan struktural kepada PRT melalui kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan buruh migran.

Pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Rizky Nur Haryani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada perspektif kepenulisan dalam penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Nur Haryani menggunakan perspektif kritis dalam mengkritisi kebijakan negara dalam melindungi perempuan buruh migran pekerja rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih merujuk pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya suatu kebijakan, yakni kebijakan moratorium TKI informal ke kawasan Timur Tengah.

Penelitian selanjutnya yakni, penelitian yang dilakukan oleh Moh Jumhur Hidayat, yang meneliti tentang *Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Promosi,*

---

<sup>26</sup> Rizky Nur Haryani, *Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. II, Oktober 2011, hal. 174-192.

*Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia dengan Menggunakan Soft Systems Methodology*,<sup>27</sup> hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, keberangkatan TKI ke luar negeri pada kenyataannya merupakan sebuah bentuk dorongan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sehingga perlu adanya pengorganisasian baik, mulai dari tahapan yang paling awal sekalipun seperti, sosialisasi kepada masyarakat agar proses migrasi karena desakan ekonomi ini tidak merugikan para calon TKI. Selain itu, munculnya dualisme pelayanan antara Kemenakertrans<sup>28</sup> dan BNP2TKI ini membuat pelayanan kepada *stakeholders* khususnya *stakeholders* non pemerintah (PPTKIS) menjadi terabaikan dan akhirnya berdampak pada penempatan, pengawasan dan perlindungan TKI yang tidak berkualitas, disisi lain sistem dualisme ini sering kali membingungkan *stakeholders* pemerintah dalam berkordinasi. Lebih lanjut, upaya dalam membenahi keseluruhan proses dari kegiatan promosi, penempatan dan perlindungan TKI, tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan harus terintegrasi.

Perbedaan penelitian tersebut, diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada pilihan fokus dan subjek penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Moh Jumhur Hidayat lebih berfokus pada peran pemerintah dalam hal promosi, penempatan dan perlindungan TKI. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadikan kebijakan pemerintah sebagai subjek utama penelitiannya. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada TKI sebagai objek penelitian.

---

<sup>27</sup> Moh. Jumhur Hidayat, *Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Promosi, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Menggunakan Soft Systems Methodology*, (Tesis), Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2013.

<sup>28</sup> Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Penelitian selanjutnya, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Cakti Indra Gunawan dan Reiza yang berjudul *The Strategy of Human Economic Development: The Effect on Reducing Migrant Worker of Informal Sector*.<sup>29</sup> Gunawan dan Reiza menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengambilan kebijakan terkait masalah tersebut. Pada masa pemerintahan SBY terdapat banyak peraturan yang mengatur masalah migrasi tenaga kerja Indonesia salah satu kebijakan yang paling utama yakni, membentuk badan tersendiri guna menangani penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2006, selain itu masih terdapat banyak rangkaian peraturan lainnya. Melihat banyaknya kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan SBY ini, Gunawan dan Reiza beranggapan semua kebijakan hanya tampak lebih fokus pada pencitraan semata, bukan substansi persoalan yang menuntut perbaikan sistem kebijakan. Sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi, pada tahun 2015 pemerintah telah mengesahkan kebijakan terhadap penanganan TKI melalui Kebijakan Rencana Program (KRP) Prioritas dan Rencana Strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 kepada anggota Komisi IX DPR-RI, selain itu terdapat pula Program bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi (KLNP) dan pembatasan TKI informal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada metode penelitiannya yang menggunakan teknik deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik eksplanatif. Selain itu konten isu yang dibahas juga memiliki perbedaan dimana pada penelitian Gunawan dan Reiza memilih

---

<sup>29</sup> Cakti Indra Gunawan dan Reiza, *Op. Cit.*



untuk menganalisis perbedaan kebijakan Presiden SBY dan Presiden Jokowi terkait penanganan TKI bermasalah serta bertujuan untuk mengetahui mengapa justru TKI sektor informal yang dapat memberikan remitansi serta devisa terbanyak dibanding dengan sektor formal dewasa ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang berfokus pada analisis kebijakan pemerintah Indonesia terkait moratorium TKI informal ke-19 negara Timur Tengah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi serta faktor apa saja yang melatar belakangi lahirnya kebijakan tersebut.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No	Judul Dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia.  Oleh: Purwaka Hari Prihanto	Eksplanatif  Deduktif  Pendekatan:  Migrasi Tenaga Kerja Internasional, Kebijakan Moratorium.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadi penurunan pekerja migran Indonesia rata-rata 4,15 persen pertahun pada rentang waktu 2005-2012  Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa, kebijakan moratorium TKI ke Malaysia dan Arab Saudi sejak tahun 2009 berdampak signifikan terhadap turunnya rata-rata total TKI yang bekerja di luar negeri, terutama pada sektor pekerja informal dan tidak berdampak signifikan terhadap pekerja sektor formal.
2.	Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap	Deskriptif	Meski moratorium merupakan salah satu solusi yang diambil pemerintah

No	Judul Dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	<p>Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi</p> <p>Oleh: Amanda R. Y</p>	<p>Deduktif</p> <p>Pendekatan: Interdependensi, <i>Dual Labour Market Theory</i></p>	<p>dalam menanggapi permasalahan TKI bermasalah, namun moratorium belum sepenuhnya dikatakan sebagai tindakan yang tepat, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah TKI ilegal.</p> <p>Moratorium mengakibatkan naiknya jumlah pengangguran.</p> <p>Moratorium tidak berdampak pada jumlah remitansi yang masuk karena diikuti dengan naiknya gaji yang diterima oleh para TKI.</p>
3.	<p>Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>Oleh: Bintara Sura Priambada</p>	<p>Deskriptif Induktif</p> <p>Pendekatan: Konsep Remitansi</p>	<p>Moratorium TKI ke Arab Saudi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap devisa negara yang berujung pada penurunan APBN.</p> <p>Beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah: mengembangkan iklim dengan proyek-proyek padat karya serta meningkatkan ekspor dibidang industri tekstil.</p>
4.	<p>Skripsi: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Tentang Penghentian Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Sikap Masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.</p>	<p>Eksplanatif Deduktif</p> <p>Pendekatan: Teori Pengambilan Keputusan, Teori</p>	<p>Kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur memiliki pengaruh yang signifikan.</p> <p>Masyarakat yang cenderung menolak kebijakan tersebut</p>

No	Judul Dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	Oleh: Yesi Suryanti	Organisasi Sikap, TKI	merasa dirugikan dengan diberlakukannya kebijakan moratorium ini.
5.	Skripsi: Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2007  Oleh: Desty Purwanti	Eksplanatif  Deduktif  Pendekatan: Kebijakan luar negeri, Diplomasi, Hak Asasi Manusia (HAM).	Permasalahan terkait PRT perlu adanya penanganan yang terintegrasi antara instansi-instansi pemerintah dengan pihak lainnya yang memiliki peran dalam penempatan dan perlindungan TKI.  Belum sepenuhnya terlaksana undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang pempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, terutama pada pasal 92 ayat 2 tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi TKI di luar negeri.
6.	Skripsi: Upaya Diplomasi Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Arab Saudi  Oleh: Siti Umi Hani	Deskriptif  Induktif  Pendekatan: Diplomasi, Kekerasan Terhadap Wanita.	Banyaknya permasalahan-permasalahan yang menimpa para TKI terutama TKW, pada akhirnya membuat pemerintahan SBY membentuk BNP2TKI pada Mei 2007. Karena dirasa pembentukan badan ini belum efisien dalam hal penanganan permasalahan TKI maka diberlakukanlah moratorium TKI ke Arab Saudi.
7.	Skripsi: Upaya Diplomati Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang	Deskriptif	Usaha diplomasi SBY pada Arab Saudi: <i>pertama</i> , memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah

No	Judul Dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	Yudhoyono dalam Mengupayakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi Tahun 2009-2014  Oleh: Moh. Alawi Jufri	Induktif  Pendekatan:  Konsep Diplomasi, Perlindungan Diplomatik	Indonesia, <i>kedua</i> pengiriman nota protes dan nota diplomatik, <i>ketiga</i> yakni, diplomasi politik dengan pemberlakuan moratorium TKI untuk mencapai kesepakatan MoU dengan Arab Saudi, <i>keempat</i> yakni, diplomasi sosial dengan cara pendekatan dengan keluarga ahli waris agar hukuman yang diterima TKI bermasalah dapat diringankan.
8.	Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI Informal (2011-2014)  Oleh: Rizka Puspitasari	Deskriptif  Induktif  Pendekatan:  Konsep <i>Forced Labour, Abolition of Forced Labour</i>	3 faktor utama penyebab terjadinya praktik kerja paksa di Arab Saudi yakni, ambiguitas dan ketidakpastian bahasa kerja paksa oleh Arab Saudi, keterbatasan kapasitas pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan <i>saudization</i> dan melakukan <i>labour inspection</i> , serta adanya dimensi temporal domestik lain yang lebih penting untuk diprioritaskan.
9.	Skripsi: Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Pada TKI di Malaysia)	Eksplanatif  Induktif  Pendekatan:  Teori Liberalisme dan Kerjasama Antar Negara, Hukum	Implementasi Undang-Undang RI No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terutama pada negara Malaysia dilakukan melalui dua tahapan yakni implementasi eksternal dan internal.

No	Judul Dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	Oleh: Linda Susistri	Internasional dan HAM.  Konsep Migrasi, Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.	
10.	Skripsi: Kegagalan Diplomasi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2004-2009.  Oleh: Prihatini Trisnawati	Ekplantif Induktif  Pendekatan: Konsep Diplomasi	Diplomasi yang dilakukan oleh Presiden SBY terkait dengan isu kekerasan TKI di Malaysia dianggap gagal karena kinerja pada pemerintahan SBY yang kurang Maksimal, yang kemudian mengakibatkan hubungan diplomatik kedua negara masih berkonflik dan belum menemui titik terang.
11.	Skripsi: Kasus Nirmala Bonat dan Implikasinya Terhadap Pembentukan MoU Mengenai Penempatan TKI Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.  Oleh: Koento Wijanarko	Eksplanatif Induktif  Pendekatan: Konsep <i>Human Security</i> , Determinan Politik Luar Negeri.	Dengan mencuatnya kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh Nirmala Bonat, pada gilirannya membuat pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang serius guna melindungi para TKI yang ada di Malaysia, yakni dengan melakukan penandatanganan MoU dengan pemerintah Malaysia tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2006.
12.	Skripsi: Peningkatan Peran Pemerintah Indonesia dalam Bidang Pengiriman	Eksplanatif	Peningkatan peran pemerintah ini dapat dilihat melalui adanya penandatanganan MoU

No	Judul Dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	Tenaga Kerja ke Korea Selatan.  Oleh: Agus Riyanto	Induktif  Pendekatan:  Konsep Interdependensi, Kerjasama Bilateral, Tenaga Kerja.	dengan Korea Selatan dalam bidang penempatan dan perlindungan TKI di Korea Selatan, yang diwakili oleh BNP2TKI dan Pemerintah Korea Selatan pada tanggal 9 Oktober 2006 lalu, dimana dalam MoU ini terdapat 3 <i>point</i> utama yang merujuk pada UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
13.	Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga.  Oleh: Rizky Nur Haryani	Eksplanatif  Deduktif  Pendekatan: Paradigma kritis	Pemerintah sebagai <i>Stakeholder</i> kebijakan tidak mampu melindungi para PRT yang bekerja di luar negeri, hal ini sangat kontra diksi dengan paradigma kritis.  Pemerintah Indonesia turut serta dalam melakukan kekerasan struktural terhadap PRT, yang mana dalam pandangan penulis PRT hanya di jadikan sebagai instrumen guna meningkatkan perekonomian negara saja, hal ini dapat disebut juga dengan pembiaraan oleh pemerintah.
14.	Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Promosi, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Menggunakan <i>Soft Systems Methodology</i>	Deskriptif  Deduktif	TKI ke luar negeri pada kenyataannya merupakan sebuah bentuk dorongan untuk mencari kehidupan yang lebih baik.  Kenyataan adanya dualisme pelayanan antara Kemenakertrans dan

No	Judul Dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	Oleh: Moh Jumhur Hidayat	Pendekatan: <i>New Institutionalism in Economic Sociologi</i>	BNP2TKI, sering kali membuat rancu para <i>stakeholders</i> ketika hendak berkordinasi.  Upaya dalam membenahi keseluruhan proses dari kegiatan promosi, penempatan dan perlindungan TKI, tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan harus terintegrasi
15.	<i>The Strategy Of Human Economic Development: The Effect on Reducing Migrant Worker Of Informal Sector.</i>  Oleh: Cakti Indra Gunawan dan Reiza	Deskriptif  Pendekatan: <i>Konsep Migrant Worker</i>	Pada masa pemerintahan Presiden SBY banyak mengeluarkan kebijakan terkait penanganan TKI bermasalah salah satunya yakni, pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibentuk berdasarkan Perpers Nomor 81 Tahun 2006.  Pada masa pemerintahan jokowi, pada tahun 2015 mengesahkan kebijakan terhadap penanganan TKI melalui Kebijakan Rencana Program (KRP) Prioritas dan Rencana Strategis BNP2TKI tahun 2015-2019, Program bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi (KLNP) dan pembatasan TKI informal.
16.	Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Moratorium TKI Informal ke Timur Tengah pada	Eksplanatif  Induktif	Diberlakukannya kembali moratorium TKI informal ke Timur Tengah dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni:

No	Judul Dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo  Oleh: Nurul Itsna Ros Diana	Pendekatan: <i>Determinants of Foreign Policy Behavior</i>	<i>Faktor internal</i> , banyaknya permasalahan yang menimpa TKI pada pengguna perseorangan, desakan aspirasi masyarakat dalam penanganan masalah TKI, serta adanya keinginan pemerintah dalam meningkatkan ketrampilan TKI.  <i>Faktor eksternal</i> : lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah, dan adanya kenyataan Arab Saudi tidak menjaga kesepakatan <i>Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Wokers</i> .

## 1.6 Landasan Teori dan Konsep

### 1.6.1 *Determinants of Foreign Policy Behavior*

Pengambilan sebuah kebijakan suatu negara pada dasarnya melibatkan berbagai hal yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan salah satunya yakni, adanya faktor internal dan faktor eksternal. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan melalui berbagai hal pertimbangan ini diharapkan dapat menyentuh tujuan yang dimaksudkan. Lebih lanjut kebijakan luar negeri merupakan sebuah instrumen yang penting dalam menentukan arah politik luar negeri suatu negara. Konsepsi kebijakan



luar negeri ini, awalnya menjadi sebuah subyek akademisi yang mengakar kuat dalam dominan sebuah kebijakan publik yang luas, terutama di Amerika Serikat.<sup>30</sup>

Pada abad ke-17 oleh negara-negara Eropa yang tengah mengalami modernisasi memandang kebijakan luar negeri sebagai dominan terpisah yang berbeda dalam hal-hal yang mendasar dari semua kebijakan publik lainnya.<sup>31</sup> Bernard C. Cohen menyatakan pada abad tersebut kebijakan luar negeri menjadi konsen utama setiap negara-negara di dunia, dibandingkan dengan kebijakan –kebijakan lainnya.<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan luar negeri sangat mempengaruhi kepentingan nasional serta memiliki peran yang fundamental, yang berada diluar kendali demokrasi dan pengawasan masyarakat. Namun, seiring berkembangnya waktu, keadaan yang sedemikian ini berubah dan mulai menempatkan kebijakan luar negeri menjadi lebih demokratis dengan menyertakan kepentingan masyarakat di dalamnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Determinants of Foreign Policy Behavior* yang dikemukakan oleh Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf. Kegley dan Wittkopf, membagi faktor yang dapat mempengaruhi dan menentukan lahirnya sebuah kebijakan luar negeri kedalam dua faktor yakni, faktor internal (*domestic influences*) dan faktor eksternal (*external influences*). Faktor internal (*domestic influences*) merupakan segala hal yang terjadi ditingkat negara, namun bukan sistem negara tersebut, yang berfokus pada variasi atribut negara seperti: geopolitik, kekuatan militer, perkembangan ekonomi, dan jenis pemerintahan yang dapat

---

<sup>30</sup> Walter Carlsnaes, *Kebijakan Luar Negeri*, dalam Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2013, hal: 684.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri yang berbeda, ke-4 faktor ini kemudian disebut pula sebagai level negara.<sup>33</sup> Faktor eksternal (*eksternal influences*) dalam hal ini mencakup segala bentuk kegiatan yang terjadi di luar batas negara, seperti: hukum internasional, jumlah aliansi militer, kemunduran lingkungan global, dan tingkat perubahan perdagangan internasional mampu mempengaruhi pilihan para pengambilan keputusan, ke-4 faktor ini kemudian disebut pula dengan level global.<sup>34</sup>

Berangkat dari kedua faktor tersebut, penulis kemudian mengkaitkan salah satu faktor internal dan level individual yang ada pada faktor internal serta dua faktor eksternal yang dimaksud oleh Kegley dan Wittkopf dalam menyoroti keputusan diberlakukannya kembali kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah. Faktor internal yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah, adanya jenis pemerintahan yang dapat mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri yang berbeda. Jenis pemerintahan yang dimaksud Kegley dan Wittkopf adalah sistem demokrasi atau otokratis yang dianut dalam sebuah pemerintahan negara akan berpengaruh dalam warna dan gaya pemerintahan negara tersebut.<sup>35</sup>

Indonesia merupakan negara yang menganut erat prinsip demokrasi dalam pemerintahannya, dengan demikian setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia tidak menutup kemungkinan merupakan hasil dari aspirasi masyarakatnya. Demikian pula dengan kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah ini, dengan adanya berbagai permasalahan TKI bermasalah hingga beradapan

---

<sup>33</sup> Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopf, *World politics Trend and Transformation*, Seventh Edition, New York: Macmillan Press, hal: 46.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.50.

dengan hukuman mati, masyarakat kerap kali menuntut pemerintah melalui berbagai demonstrasi agar lebih tegas dalam menangani permasalahan tersebut, terutama pasca dihukum matinya Siti Zaenab Binti Duhri dan Karni Binti Medi Tarsim pada tahun 2015 lalu,<sup>36</sup> dengan adanya berbagai desakan dan aspirasi masyarakat inilah kemudian pemerintah memberlakukan kembali moratorium TKI informal ke Timur Tengah.

Alasan lain penulis hanya memilih jenis pemerintahan dalam faktor internal sebagai alat analisis kasus, dikarenakan ketiga faktor lainnya (geopolitik, kekuatan militer dan perkembangan ekonomi) dirasa kurang relevan dalam menjelaskan studi kasus yang diteliti penulis. Faktor geopolitik, dalam hal ini Kegley dan Wittkopf berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari pertimbangan geopolitik (letak lokasi, sumber daya alam serta lingkungan fisiknya), sebagai contoh Kegley dan Wittkopf membahas tentang keadaan negara-negara Amerika Latin yang cenderung menerapkan kebijakan luar negeri mereka untuk melawan imperialisme Yankee<sup>37</sup>. Hal ini mereka lakukan karena mereka sadar betul dengan letak geografis mereka yang berdekatan dengan Amerika Serikat (*super power state*), yang mana selama beberapa dekade sebelumnya negara-negara Amerika Latin sering mendapat perlakuan yang buruk (sebagai kepentingan objek studi dan seringkali menjadi objek intervensi) dari Amerika Serikat karena ketergantungan perekonomian mereka pada Amerika Serikat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Salmah Muslimah, *TKW Karni Asal Brebes Dihukum Pancun di Arab Saudi Hari Ini*, dalam <http://news.detik.com/berita/2889651/tkw-karni-asal-brebes-dihukum-pancung-di-arab-saudi-hari-ini> diakses pada 2 April 2017, pukul 01:12 WIB

<sup>37</sup> Sebutan untuk Amerika Serikat dari negara-negara Amerika Latin.

<sup>38</sup> Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopf, *Op. Cit*, hal. 47.

Berangkat dari analogi Kegley dan Wittkopf mengenai faktor geopolitik sebelumnya, jika dibenturkan dengan keadaan Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, maka faktor ini kurang relevan. Hal ini dikarenakan letak geografi Indonesia dan negara-negara Timur Tengah yang saling berjauhan. Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sementara negara-negara Timur Tengah meski terletak pada Benua Asia namun, Indonesia dan negara-negara Timur Tengah masih dipisahkan oleh beberapa negara yakni; Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Bangladesh, India, Nepal, China, dan Mongolia. Selain itu adanya Samudera Hindia yang luas yang membentang antara Indonesia hingga Benua Afrika memperjelas bahwa Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah memiliki letak geografis yang saling berjauhan. Dari penjabaran terkait faktor geopolitik tersebut, maka oleh penulis faktor geopolitik dapat dikatakan bukan sebagai faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium TKI informal ke Timur Tengah.

Faktor selanjutnya yakni kemampuan militer, dalam hal ini Kegley dan Wittkopf menyatakan suatu negara dengan kemampuan militer yang sangat kuat dapat membuat kebijakan luar negeri yang lebih agresif dibandingkan dengan negara-negara dengan kemampuan militer yang lebih lemah.<sup>39</sup> Hal ini berhubungan dengan kesiapan negara dalam menghadapi ancaman dan melindungi teritorial, negara dengan kemampuan militer yang kuat akan merasa leluasa dalam melakukan politik luar negerinya dikarenakan mereka merasa tidak ada lagi ancaman yang dapat mengganggu politik luar negeri mereka.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 48.

Berangkat dari kenyataan tersebut, jika dilihat dari kemampuan Militer Indonesia, dapat dikatakan Militer Indonesia berkembang sangat pesat yakni menempati posisi ke-22 dunia pada tahun 2012, posisi ke-19 pada tahun 2015, ke-12 pada tahun 2016 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 yakni menempati posisi ke-14.<sup>40</sup> Meski demikian, peringkat militer beberapa negara Timur Tengah menempati posisi yang lebih tinggi dibanding dengan peringkat Militer Indonesia yakni; Mesir berada pada posisi ke-10 serta Pakistan pada posisi ke-13.<sup>41</sup> Selain itu terdapat negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Israel, Iran dan Saudi Arabia yang berada di *top* 25, dengan posisi masing-masing yakni; Israel ke-15, Iran ke- 21 dan Saudi Arabia ke-24.<sup>42</sup> Dengan kenyataan demikian Indonesia tidak dapat dengan leluasa melakukan politik luar negerinya dengan pertimbangan masih banyaknya negara-negara dengan kekuatan militer yang jauh lebih kuat, terutama Amerika Serikat yang menempati posisi pertama dalam peringkat Militer dunia.<sup>43</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, maka faktor kekuatan militer dapat dikatakan bukan sebagai faktor yang melatar belakangi pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium TKI..

Faktor selanjutnya yakni perkembangan ekonomi, dalam hal ini Kegley dan Wittkopf menyatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi dan industri suatu negara dapat mempengaruhi tujuan kebijakan luar negeri yang dapat diraihinya.<sup>44</sup> Negara dengan perekonomian berkembang cenderung menjadi aktor yang aktif dalam ekonomi

---

<sup>40</sup> Abi Sarwanto, CNN Indonesia, *Kekuatan Militer Indonesia Diharapkan Masuk 10 Besar Dunia*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171005132550-20-246335/kekuatan-militer-indonesia-diharapkan-masuk-10-besar-dunia>, diakses pada 30 Juli 2018, pukul 11:03 WIB.

<sup>41</sup> Vita Ayu Anggraeni, *Top 25 Militer Dunia dan Alutsistanya*, dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/04/15/top-25-militer-dunia-dan-alutsistanya>, diakses pada 30 Juli 2018, pukul 11:36 WIB.

<sup>42</sup> *Loc. Cit*

<sup>43</sup> *Loc. Cit*

<sup>44</sup> Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopf, *Op. Cit*, hal. 47.

politik global, sedangkan negara kaya lebih cenderung memiliki kepentingan yang lebih besar yang diikuti dengan sarana yang dapat mewujudkan serta melindungi kepentingan mereka dalam politik global.<sup>45</sup> Dalam hirarki politik internasional negara kaya menempati puncak hirarki global, yang mana dengan mereka berada di puncak hirarki global maka secara otomatis mereka dapat membuat rezim internasional atau bahkan sistem internasional yang menguntungkan mereka, di sisi lain negara-negara lainnya termasuk negara-negara miskin sekalipun terpaksa atau dipaksa untuk patuh dengan mengatas namakan kepentingan global.

Jika dilihat kondisi perekonomian Indonesia yang merupakan negara berkembang, maka Indonesia pada politik global lebih cenderung menjadi aktor yang aktif dalam berbagai partisipasi politik global dibandingkan dengan melaksanakan politik luar negeri atau kepentingan domestiknya pada forum-forum global lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki *power* yang cukup besar untuk berhadapan dengan negara-negara dengan perekonomian yang kuat lainnya. Negara-negara dengan perekonomian yang kuat seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, China, negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah dan sebagainya memiliki peran yang sangat dominan dalam forum-forum global, dengan kekuasaan yang dominan inilah mereka mampu menguasai politik global. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka faktor perkembangan ekonomi bukan sebagai faktor yang membuat pemerintah Indonesia melakukan moratorium ke Timur Tengah.

Lebih lanjut, dalam faktor internal terdapat pula level individual yang berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Pada level individual yakni terkait

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

dengan karakteristik pemimpin suatu negara seperti keyakinan pribadi, nilai, dan kepribadiannya,<sup>46</sup> dalam konteks penelitian ini maka dapat dilihat dari visi-misi dan program prioritas Presiden Jokowi yang pada dasarnya merupakan cerminan dari kepribadiannya. Presiden Jokowi terkenal dengan kepribadiannya yang *low profile*, peduli dengan rakyat kecil dan tegas. Kepribadian inilah yang kemudian berdampak pada warna kebijakan yang ia hasilkan. Trisakti dan Nawa cita merupakan salah satu wujud cerminan dari keyakinan dan kepribadian Presiden Jokowi yang diaplikasikan ke dalam sebuah produk kebijakan.

Terdapat beberapa poin Trisakti yang menggambarkan kepedulian Presiden Jokowi terhadap buruh migran yakni: *poin pertama* tentang komitmen membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (huruf b) dalam Aspek *Berdaulat Dalam Bidang Politik* yaitu<sup>47</sup>, membangun kapasitas untuk melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *poin kelima* tentang komitmen membangun pemberdayaan buruh pada aspek berdikari dalam bidang ekonomi.<sup>48</sup> Pada *poin kesepuluh* tentang komitmen pemberdayaan perempuan dalam politik dan pembangunan dalam kebijakan pemberdayaan perempuan huruf g.<sup>49</sup> Serta Trisakti pada aspek *berdikari dalam bidang ekonomi*, poin ke-5 tentang komitmen untuk membangun pemberdayaan buruh yang diwujudkan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014, Jakarta, Mei 2014, hal. 14-15.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 26

melalui 10 agenda utama. Dari 10 agenda tersebut terdapat 3 agenda penting yang sangat berpihak kepada buruh migran yakni pada agenda ke 7, 8, dan 9.<sup>50</sup>

Dalam Sembilan Agenda Prioritas (Nawa cita) terdapat pula salah satu poin yang menggambarkan keperdulian Presiden Jokowi terhadap buruh Migran yakni<sup>51</sup>, tentang komitmen dalam melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara, salah satunya yaitu terhadap perlindungan hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya para pekerja migran. Kepribadiannya Presiden Jokowi yang sangat peduli dengan rakyat kecil terutama buruh migran inilah yang pada akhirnya membuat moratorium TKI informal ke Timur Tengah diberlakukan kembali dengan alasan melindungi seluruh rakyat Indonesia termasuk buruh migran yang rentan akan tindak kekerasan dan praktik kerja paksa.

Sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini peneliti merujuk pada adanya hukum internasional yang berlaku serta tingkat perubahan perdagangan. Terkait dengan faktor hukum internasional, hal ini sejalan dengan adanya kenyataan bahwa minimnya perlindungan yang didapat para TKI informal di negara tujuan yakni Timur Tengah, yang menjadikan TKI kerap kali menerima kekerasan dan praktik kerja paksa. Peristiwa ini menandakan bahwa, negara-negara Timur Tengah tidak mengindahkan konvensi ILO tentang perburuhan. Hal ini diperparah dengan pelanggaran MoU tentang *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* oleh Arab Saudi yang telah ditanda tangani pada 19 Februari 2014 lalu.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 37-38

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>52</sup> Diana Fatmawati, *Penandatanganan MoU Antara Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014*, dalam <http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/28-diana.pdf> diakses pada 1 April 2017, pukul 23:18 WIB.



Sedangkan pada faktor tingkat perubahan perdagangan, dalam hal ini kebijakan yang diambil suatu negara lebih dikaitkan dengan pendapatan ekonomi dalam sektor perdagangan (ekspor-impor), terkait dengan hal ini pemerintah suatu negara akan berfokus pada kalkulasi untung-rugi dengan kegiatan perdagangan yang mereka lakukan dengan mitra dagang mereka. Selain itu, perubahan minat dan *trend* di pasar global juga menjadi perhitungan yang cukup berpengaruh dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri terkait dengan sektor perdagangan.

Dalam faktor ini Kegley dan Wittkopf menyatakan bahwa tingkat perubahan perdagangan Internasional dapat dikaitkan pula dengan sistem internasional seperti tingkat perdagangan yang saling ketergantungan,<sup>53</sup> dalam hal ini jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka tingkat perdagangan yang saling ketergantungan ini dapat diartikan dengan negara-negara Timur Tengah yang sangat tergantung dengan perdagangan jasa Indonesia yakni para TKI terutama dalam bidang informal. Hal inilah yang kemudian menjadikan Indonesia mempertimbangkan dan memberlakukan kembali moratorium TKI informal ke-19 negara Timur Tengah guna memperbaiki sistem hukum penempatan dan perlindungan TKI informal di kawasan Timur Tengah, dan tidak langsung memutus hubungan dengan negara-negara Timur Tengah mengingat perekonomian Indonesia juga berasal dari remitansi para TKI Timur Tengah tersebut.

Alasan penulis hanya mengkaitkan kasus yang diteliti penulis dengan dua faktor eksternal yakni faktor hukum internasional dan tingkat perubahan perdagangan

---

<sup>53</sup> Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopf, *Op. Cit*, hal. 45.

dikarenakan, penulis melihat bahwa ke-2 faktor lainnya (jumlah aliansi militer dan kemunduran lingkungan global) belum dapat menjelaskan kasus yang sedang diteliti oleh penulis. Ke-2 faktor tersebut yakni, Faktor jumlah aliansi militer, dalam hal ini terkait dengan *tangible power* di mana sebuah negara dengan jumlah aliansi militer yang besar akan mudah ditakuti negara-negara lain, dengan demikian, negara dengan jumlah aliansi militer yang besar ini mampu membuat kebijakan luar negeri dengan lebih leluasa, faktor ini lebih banyak diperhitungkan ketika dalam masa-masa peperangan seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Kenyataan bahwa faktor jumlah aliansi militer banyak diperhitungkan dalam masa peperangan, menyebabkan faktor ini tidak dapat menjelaskan kondisi Indonesia yang mengeluarkan kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah sebagai salah satu bentuk upaya pemberian perlindungan kepada TKI informal berdasarkan banyaknya dorongan dan desakan dari masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat pula dengan kenyataan bahwa hubungan Indonesia dan negara-negara yang cukup baik dan tidak dalam kondisi sengketa ataupun peperangan.

Faktor selanjutnya yakni, kemunduran lingkungan global. Protokol Kyoto merupakan salah satu rezim lingkungan yang dapat menjelaskan faktor ini. Hal ini, tidak lain dikarenakan Protokol Kyoto sendiri yang ada dan mulai terbentuk dari negara-negara dunia yang menyadari adanya kemunduran lingkungan dan mulai memberi perhatian yang cukup serius dalam masalah isu-isu lingkungan. Bersatunya negara-negara dunia dalam berkomitmen membuat suatu rezim lingkungan ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari kebijakan luar negeri masing-masing negara yang

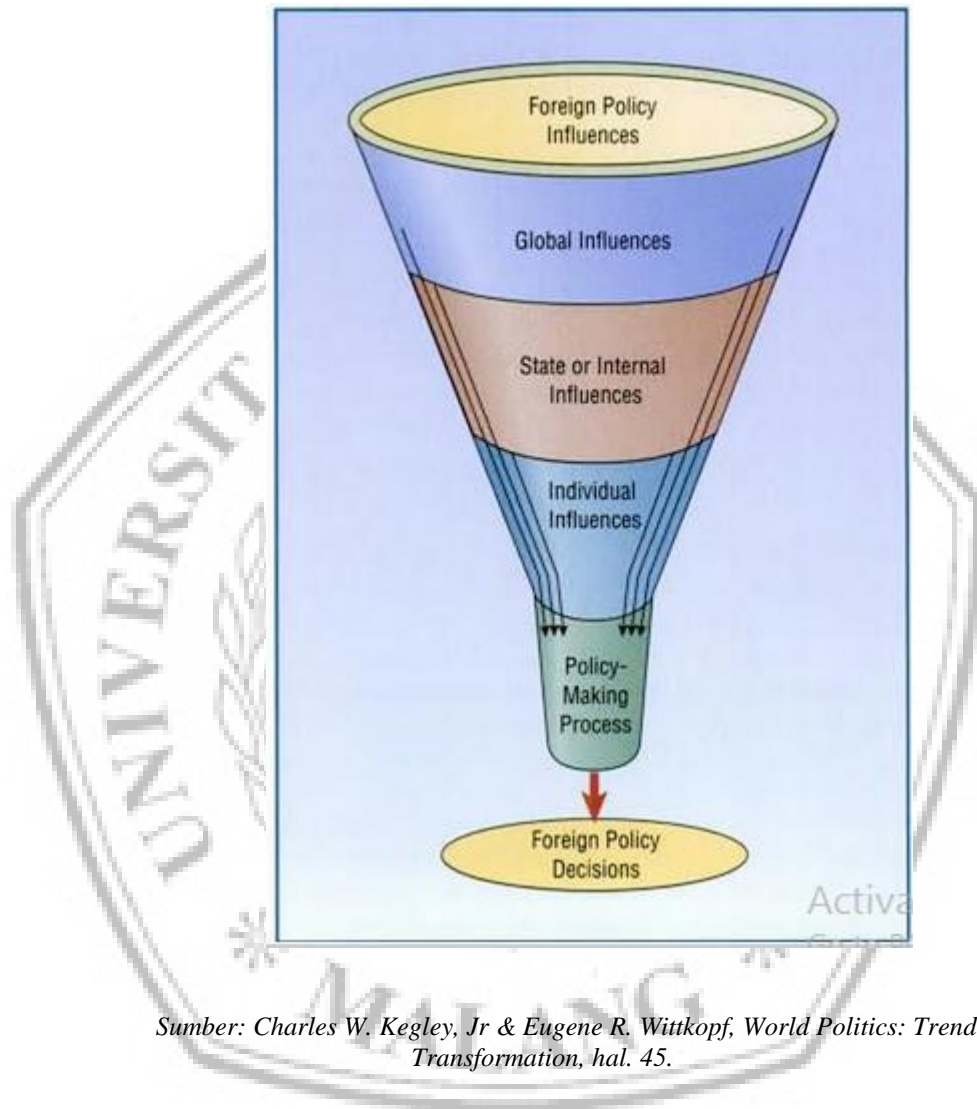
sedang mereka laksanakan, terlepas dari semua kepentingan nasional yang mereka bawa dibalik sikap mereka meratifikasi rezim ini.

Faktor kemunduran lingkungan global ini, dapat dikatakan bukan sebagai faktor yang mampu menjelaskan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait moratorium TKI informal. Hal ini dikarenakan, kebijakan ini lahir karena adanya kekhawatiran pemerintah terkait tingginya jumlah TKI bermasalah di Timur Tengah, terutama TKI yang beradapan dengan hukuman mati. sedangkan faktor kemunduran lingkungan, merupakan faktor yang digunakan untuk menjelaskan dan mengamati permasalahan terkait lingkungan, dan bagaimana perilaku suatu negara dalam mengambil keputusan terutama politik luar negerinya terkait permasalahan lingkungan tersebut.

Ketiga level ini (level global, level negara dan level individual) secara bersamaan dapat mempengaruhi keputusan pembuatan kebijakan luar negeri, namun ketiganya bersifat relatif dimana hal ini biasanya tergantung pada isu dan keadaan suatu negara pada saat itu. Berikut merupakan analogi dari ketiga level yang mampu mempengaruhi keputusan pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

**Gambar 1.1**

***Analogi Foreign Policy Decision***



*Sumber: Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopf, World Politics: Trend and Transformation, hal. 45.*

Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis menjadi relevan jika dianalisis dengan teori kebijakan luar negeri menggunakan konsep yang di kemukakan oleh Kegley dan Wittkopf, mengingat lahirnya kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah ini berasal dari pertimbangan faktor internal dan eksternal.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksplanatif, penelitian eksplanatif adalah sebuah penelitian yang berupaya untuk menjawab pertanyaan “mengapa?”, atau lebih tepatnya upaya untuk menjelaskan atau meramalkan tingkah laku tertentu dari aktor-aktor atau fenomena yang menjadi subjek penelitian.<sup>54</sup> Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian eksplanatif, dikarenakan peneliti ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data-data dalam penelitian ini didapat dari studi pustaka dan wawancara.

### 1.7.2 Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang dilakukan oleh peneliti melalui tiga tahapan yakni:<sup>55</sup> Reduksi Data, diartikan sebagai proses atau tahapan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang didapat selama pengumpulan data atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dalam tahapan ini peneliti berusaha untuk mengorganisir data sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan final serta dapat diverifikasi. Penyajian data, di mana pada tahapan ini telah ada sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga dapat menentukan tindakan selanjutnya dan penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan, pada tahapan ini

---

<sup>54</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1990, hal: 261-262.

<sup>55</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj: Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992, dalam Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, hal 339-341.

peneliti melakukan verifikasi ulang tau peninjauan kembali terhadap data yang telah ada, sehingga didapat sebuah kesimpulan final yang valid.

Analisa data dalam penelitian ini bersifat Induktif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai TKI serta isu-isu seputar TKI bermasalah yang berujung pada hukuman mati, dilanjutkan dengan penerapan kebijakan moratorium TKI informal ke negara-negara kawasan Timur Tengah, terutama Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk respon pemerintah terhadap hukuman mati yang menimpa TKI.

### **1.7.3 Tingkat Analisa dan Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yakni, Dependen dan Independen. Variabel dependen merupakan variabel yang digunakan untuk menganalisa tingkah laku dari subjek/objek yang diramalkan dan diprediksi oleh variabel Independen, sedangkan variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk menjelaskan tingkah laku dari variabel dependen.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah alasan lahirnya kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah, sedangkan variabel independennya adalah kebijakan pemerintah Indonesia terkait moratorium TKI informal ke Timur Tengah, sedangkan unit analisa dari penelitian ini adalah *nation-state*. Hubungan kedua variabel ini adalah bersifat korelasionis.

---

<sup>56</sup> Mohtar Mas'ood, *Op. Cit.* hal.35.

## 1.7.4 Ruang Lingkup

### 1.7.4.1 Batas Waktu

Dalam penelitian ini peneliti membatasi waktu penelitian pada tahun 2014-2015. Dengan rincian sebagai berikut: pada 19 Februari 2014 pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melakukan sebuah kesepakatan dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*)<sup>57</sup> tentang *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* untuk melindungi hak TKI di Arab Saudi.<sup>58</sup> Sejalan dengan adanya MoU ini, maka moratorium TKI informal yang pertama pada masa Presiden SBY ke Timur Tengah terutama pada Arab Saudi telah dicabut.

Namun, tidak lama setelah kesepakatan MoU dan pencabutan kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah, pemerintah Indonesia mendapat kabar buruk mengenai ancaman hukuman mati 2 TKW (Siti Zaenab binti Duhri dan Karni binti Medi Tarsim) pada tahun 2015.<sup>59</sup> Berbagai macam upaya dan usaha diplomasi telah diluncurkan namun pada akhirnya kedua TKW ini menerima hukumannya. Siti Zaenab binti Duhri dieksekusi pada hari Selasa 14 April 2015 dan Karni binti Medi Tarsim pada hari Kamis 16 April 2015.<sup>60</sup> Kenyataan ini kemudian menjadi sebuah pukulan keras pemerintah Indonesia yang gagal dalam melindungi warga negaranya,

---

<sup>57</sup> Diana Fatmawati, *Op. Cit.*

<sup>58</sup> Widad Muhammad Khaitam, *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Antara Republik Indonesia dengan Arab Saudi dalam Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Arab Saudi*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014, hal. 1

<sup>59</sup> Salmah Muslimah, *TKW Karni Asal Brebes Dihukum Pancung di Arab Saudi Hari Ini*, dalam <http://news.detik.com/berita/2889651/tkw-karni-asal-brebes-dihukum-pancung-di-arab-saudi-hari-ini> diakses pada 2 April 2017, pukul 01:12 WIB.

<sup>60</sup> *Ibid.*

yang kemudian diikuti dengan pemberlakuan kembali moratorium TKI informal ke negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama di Arab Saudi.

#### **1.7.4.2 Batasan Materi**

Materi yang akan dibahas pada penelitian ini berfokus pada mengapa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium TKI informal ke 19 negara di kawasan Timur Tengah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Materi pembahasan dalam penelitian ini dibatasi juga dengan *locus* (siapa yang diteliti) yakni: pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah oleh pemerintah Indonesia banyak menuai pro-kontra terutama dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Selain itu, penelitian ini dibatasi pula dengan *focus* (apa yang diteliti dari *locus*) yakni: kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor penyebab kebijakan tersebut lahir dan diberlakukan.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada Muhammad Iqbal. S.H selaku Kepala P4TKI Malang, serta dua Staf Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan yakni, Ali Sabit Halidi dan Teguh Fatiar. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumentasi atau *library research* dalam pengumpulan datanya, metode dokumentasi merupakan tindakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,



*website* dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh lembaga, atau instansi yang memiliki korelasi dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

## 1.8 Hipotesa

Pemberlakuan kembali kebijakan moratorium TKI informal yang diatur dalam keputusan Kementerian Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 dilatar belakangi oleh 2 faktor utama yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait dengan faktor jenis pemerintahan dan level individual. Pada level individual dapat dilihat dari kepribadian seorang pemimpin suatu negara, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi yang memiliki kepribadian yang *low profile*, peduli dengan rakyat kecil serta tegas dalam bertindak dapat tercermin melalui warna kepemimpinan serta program atau kebijakan yang ia hasilkan (Trisakti dan Nawa cita). Sedangkan, faktor jenis pemerintahan dikaitkan pada opini masyarakat Indonesia yang menganut sistem demokrasi, di mana dengan adanya sistem demokrasi ini dapat memungkinkan rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya terkait isu-isu TKI bermasalah.

Lebih lanjut, faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini yakni terkait dengan faktor hukum internasional dan faktor tingkat perubahan perdagangan internasional. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan faktor hukum internasional yakni terkait dengan adanya konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 87 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi, No. 105 tentang penghapusan semua bentuk kerja paksa, No. 189 tahun 2011 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga, serta MoU tentang *agreement the placement and protection of Indonesian domestic workers* antara Indonesia dan Arab Saudi yang

kemudian dilanggar oleh Arab Saudi. Adanya pelanggaran oleh Arab Saudi inilah yang mengakibatkan banyaknya kasus TKI bermasalah. Sedangkan, pada faktor tingkat perubahan perdagangan internasional yakni terkait pada tingkat perdagangan jasa yang saling ketergantungan antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah.

## 1.9 Sistematika Penulisan

Secara garis besar jika dideskripsikan penulisan dari Bab per Bab dalam penelitian ini, maka perinciannya adalah sebagai berikut, pada Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang; latar belakang permasalahan yang dibahas oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, teori atau konsep yang dalam hal ini penulis menggunakan konsep *Determinants of Foreign Policy*, metode penelitian yang terdiri dari (jenis penelitian, teknik analisa data, tingkat analisa dan variabel penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari batasan waktu dan batasan materi, dan teknik pengumpulan data), hipotesa, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II berisi tentang pembahasan permasalahan TKI di Timur Tengah dan kebijakan moratorium TKI informal. Bab ini dimulai dengan topik gambaran umum TKI di Timur Tengah sebelum moratorium, termasuk TKI dan isu TKI bermasalah yang dibahas dalam dua sub Bab yakni; *Gambaran Umum TKI di Timur Tengah* dan *Gambaran TKI Bermasalah*. Pembahasan selanjutnya berkenaan dengan moratorium TKI yang dibahas dalam dua sub Bab yakni; *Moratorium Pertama pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* dan *Moratorium Kedua pada Masa Presiden Joko Widodo*.

Adapun Bab III membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi Indonesia memberlakukan moratorium TKI ke Timur Tengah. Bab ini terdiri dari dua sub Bab yakni; *Komitmen Presiden Jokowi Terhadap Permasalahan TKI Informal di Timur Tengah*, serta *Aspirasi Dan Bentuk Tindakan Masyarakat Indonesia dalam Menyuarakan Hak Para TKI*. Sub Bab kedua dalam Bab ini, terdiri dari empat sub Bab pembahasan tentang beberapa organisasi masyarakat dan salah satu lembaga pemerintahan yang peduli dengan hak buruh migran (*Migran Care*, Jaringan Buruh Migran/JBM, Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia/Kabar Bumi, serta Komisi IX DPR RI).

Selanjutnya pada Bab IV, penulis membahas tentang faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam memberlakukan moratorium TKI informal ke Timur Tengah. Bab ini terdiri dari dua sub Bab yakni; *Peran Organisasi Internasional dalam Mengemban Tugas Penegakan Hukum Internasional* serta *Ketertanggung Perdagangan Jasa Negara-negara Timur Tengah Terhadap Indonesia*. Pada sub Bab pertama penulis membahas pula tentang Peran ILO dan Konsekuensi Pemerintah Indonesia dalam Ratifikasi Konvensi ILO serta Ketertanggung Perdagangan Jasa Negara-negara Timur Tengah Terhadap Indonesia. Sedangkan, Bab terakhir merupakan Bab di mana penulis memberi kesimpulan dari hasil penelitiannya serta pemberian saran terhadap peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.